

GAMBARAN INDUSTRI SEDANG DAN KECIL PROVINSI MALUKU UTARA

2015



Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Survei Industri Mikro dan Kecil 2015

Gambaran Industri Mikro dan Kecil Provinsi Maluku Utara 2015

Katalog BPS : 6104009.82
No. Publikasi : 82530.1601
Ukuran Buku : 21,5 cm x 16,5 cm
Jumlah Halaman : vii + 67
Naskah : Bidang Statistik Produksi
BPS Provinsi Maluku Utara
Gambar Kulit : Bidang Statistik Produksi
BPS Provinsi Maluku Utara
Diterbitkan oleh : BPS Provinsi Maluku Utara

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://makt.bps.go.id>

Kata Pengantar

Publikasi Gambaran Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Maluku Utara 2015 ini merupakan publikasi hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2015 (VIMK15).

Publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri manufaktur yang mempunyai tenaga kerja 1 – 19 orang, yang antara lain meliputi banyaknya perusahaan, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pengeluaran, pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, pelayanan usaha, dan bimbingan usaha serta distribusi dan pemasaran Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Maluku Utara.

Disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari lengkap dan sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada pada publikasi yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam penentuan kebijakan, penelitian, analisis data, evaluasi program, maupun keperluan lainnya.

Ternate, Juli 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara,

Drs. MISFARUDDIN, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v - vii
PENJELASAN UMUM	1 – 18
RINGKASAN EKSEKUTIF	19 – 25
DAFTAR TABEL	27 – 67
Tabel 1. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	29
Tabel 2. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2015	30
Tabel 3. Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua Tahun 2015	31
Tabel 4. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari di Wilayah Maluku-Papua menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2015	32
Tabel 5. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2015	34
Tabel 6. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2015	35
Tabel 7. Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2015	36

		Halaman
Tabel	8. Banyaknya Tenaga Kerja Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin Tahun 2015	38
Tabel	9. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan Tahun 2015	40
Tabel	10. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Besaran Pendapatan Setahun Tahun 2015 .	42
Tabel	11. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Sumber Modal Tahun 2015	44
Tabel	12. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Asal Pinjaman Utama Tahun 2015	45
Tabel	13. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Asal Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2015	47
Tabel	14. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Meminjam dari Bank menurut Besarnya Pinjaman Tahun 2015	49
Tabel	15. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kredit Bersubsidi Tahun 2015	50
Tabel	16. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2015	51
Tabel	17. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2015	53

		Halaman	
Tabel	18.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2015	54
Tabel	19.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2015	56
Tabel	20.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang menjadi Anggota Koperasi menurut Jenis Pelayanan yang Diterima Tahun 2015	58
Tabel	21.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Menerima Pelayanan/Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan Tahun 2015	60
Tabel	22.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Tahun 2015	62
Tabel	23.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Mengikuti Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan (BPP) menurut Penyelenggara BPP yang Diterima Tahun 2015	63
Tabel	24.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Distribusi Pemasaran dan Banyaknya Hasil Produksi untuk Perusahaan Tahun 2015	65
Tabel	25.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alokasi Utama Pemasaran Hasil Produksi Tahun 2015	67

PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Di Indonesia, peran sektor industri masih cukup penting. Sektor industri masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dalam penghitungan produk domestik bruto. Kontribusi sektor industri sebesar 20,12 persen di tahun 2014, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang memberikan kontribusi sebesar 20,98 persen¹.

Tidak saja memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produksi, akan tetapi sektor industri juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014, sektor industri mampu menyerap sebanyak 13,49 juta orang dan 61,96 persen bekerja di sektor industri mikro dan kecil.

Dalam era reformasi, perekonomian dibangun berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, dimana komponen utama ekonomi kerakyatan adalah sumber daya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan sebagai pengusaha. Dengan demikian, sistem ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Secara kongkret, upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK).

Intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil mengakibatkan usaha IMK lebih fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar menyebabkan IMK mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi.

¹ Berita Resmi Statistik, No. 17/02/Th.XVIII, 5 Februari 2015

IMK tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena karena dapat tanggap menangkap peluang untuk substitusi impor dan meningkatkan persediaan domestik. Pengembangan IMK dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan percepatan perubahan struktur sebagai pra kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK, maka diselenggarakan Survei Industri Mikro Kecil Tahun 2015 (VIMK15). Pendekatan pencacahan VIMK15 dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan VIMK15 adalah perusahaan/usaha berskala mikro dengan tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

B. Tujuan

Secara umum VIMK15 bertujuan untuk mengetahui profil IMK daerah potensi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. Data yang dikumpulkan dan disajikan hasil pencacahan VIMK15 merupakan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci serta mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Adapun tujuan VIMK15 secara khusus adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai keterangan mengenai kegiatan ekonomi menurut dua digit KBLI, sebagai estimasi Indikator IMK seperti:

- a. Banyaknya usaha
- b. Banyaknya tenaga kerja
- c. Pengeluaran untuk tenaga kerja
- d. Struktur input dan output
- e. Kendala dan prospek usaha
- f. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

C. Lingkup dan Cakupan

VIMK15 ini dilaksanakan pada 60 blok sensus terpilih dan mencakup 530 perusahaan/usaha mikro dan kecil yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

D. Dokumen yang Digunakan

Untuk pelaksanaan VIMK15 ini, menggunakan beberapa jenis daftar dan buku pedoman. Adapun jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan dalam pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil serta kegunaannya ada sebagai berikut:

1. **VIMK15-DSBS Tahunan (Daftar Sampel Blok Sensus)**, digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. **VIMK15-L2 (Listing)**, digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. **VIMK15-RB2 (Rekap Blok Sensus)**, digunakan untuk jumlah Industri Mikro dan Kecil per blok sensus.
4. **VIMK15-DS2 (Daftar Sampel)**, digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
5. **VIMK15-S2 (Sampel)**, digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
6. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI Industri Manufaktur, dan pedoman pengolahan.

E. Metodologi

1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha adalah jenis-jenis kerangka sampel yang digunakan dalam VIMK15. Dengan uraian masing-masing kerangka sampel sebagai berikut:

- a. Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil (IMK) hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2006 (SE2006).
- b. Kerangka sampel usaha adalah daftar usaha hasil pendaftaran Survei IMK 2015 yang dibedakan menurut usaha industri kecil dan usaha industri mikro.

2. Stratifikasi Blok Sensus

Pada Survei IMK 2015 stratifikasi blok sensus yang digunakan sama dengan stratifikasi yang dibentuk berdasarkan hasil SE 2006. Pada bagian ini diuraikan kembali proses stratifikasi blok sensus tersebut. Tujuan dilakukannya stratifikasi blok sensus adalah untuk mengelompokkan blok sensus menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jumlah relatif usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) menurut jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) golongan pokok (2 digit). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Stratifikasi blok sensus dilaksanakan pada level provinsi.

3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel dua tahap terstratifikasi (*Stratified Two - Stage Sampling*).

Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih 60 blok sensus secara *Probability Proportional to Size (PPS)* dengan *size* banyaknya usaha IMK hasil pendataan Sensus Ekonomi 2006. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara *independent*.

Tahap kedua, adalah mengambil seluruh industri kecil sebagai sampel, dan dilakukan pemilihan sejumlah industri mikro dari hasil pendaftaran IMK secara sistematis linier untuk setiap jenis usaha sesuai KBLI pada blok sensus terpilih. Bila jumlah industri kecil dalam suatu provinsi melebihi target sampel IMK, maka harus dilakukan pemilihan sampel untuk industri kecil. Jumlah sampel Survei IMK 2015 Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 66 blok sensus dan 530 usaha IMK.

4. Alokasi Sampel Usaha IMK Per Kabupaten/Kota

Pengalokasian target pencacahan untuk industri mikro dan industri kecil dilakukan berdasarkan hasil listing. Khusus untuk industri kecil, seluruh usaha dalam tiap blok sensus terpilih dilakukan pencacahan lengkap (*take all*) kecuali jika jumlahnya melebihi target usaha IMK atau industrinya homogen, maka harus dilakukan pemilihan sampel, industri industri mikro dilakukan pencacahan hanya pada usaha terpilih.

BPS Provinsi Maluku Utara melakukan alokasi sampel usaha industri mikro dan kecil (IMK) berdasarkan rekapitulasi jumlah IMK hasil listing per kabupaten/kota. Sedangkan alokasi sampel industri mikro (IM) per kabupaten/kota dilakukan setelah sebelumnya mengurangi target IMK provinsi dengan jumlah industri industri kecil (IK) sebagai sampel. Alokasi IM dilakukan secara *square root proportional* terhadap jumlah *square root* IM di masing-masing kabupaten/kota. Hasil alokasi IM per kabupaten/kota dikembalikan ke masing-masing kabupaten/kota, untuk selanjutnya dilakukan alokasi menurut KBLI.

F. Organisasi Lapangan

Untuk kelancaran pelaksanaan lapangan VIMK15, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan yang penanggung jawab pelaksanaannya di Provinsi Maluku Utara adalah Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Maluku Utara, sedangkan *subject matter* adalah Sub Direktorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga BPS-RI.

Petugas yang terkait dalam VIMK15 adalah:

- a. Petugas Pencacah Sampel (PCS): Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Staf BPS/Mitra Statistik.
- b. Petugas Pemeriksa: Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Koordinator Pelaksanaan di Kecamatan: KSK (Aparat BPS pada tingkat kecamatan).
- d. Koordinator Pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota: Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- e. Koordinator Pelaksanaan di tingkat Provinsi: Kepala BPS Provinsi Maluku Utara.

G. Konsep dan Definisi

Agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias, sangat diperlukan konsep dan definisi. Untuk itu, beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK15, yaitu:

- a. **Industri Manufaktur:** Kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri manufaktur (*makloon*).
- b. **Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur:** Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur; terletak pada suatu

bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

c. **Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur:** Unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balasan jasanya (nilai upah *makloon*).

d. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI yang digunakan adalah KBLI 2009 yang menggunakan kode 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi.

e. **Produksi Utama**

Produksi utama yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:

- 1) Produksi yang mempunyai nilai **produksi/jasa industri** terbesar;
- 2) Jika nilai produksi/jasa industri sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
- 3) Jika nilai produksi/jasa industri dan volume barang/jasa sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
- 4) Jika nilai produksi/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.

f. **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

- 1) **Tidak Tamat SD:** Mereka yang tidak sekolah/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat di sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah

Dasar Kecil, Paket A1 – A100. Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap belum tamat.

- 2) **SD & Sederajat:** Mereka yang tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 – A100.
- 3) **SLTP & Sederajat:** Mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), MULO, HBS 3 tahun, SLB Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Ketrampilan Kejuruan Pertama (SKKP) 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama (SPMP), Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Kursus Karyawan Perusahaan (KKP), dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama (PPUPA).
- 4) **SLTA & Sederajat:** Mereka yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Umum (SMU), HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah (STM), Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Ketrampilan Kejuruan Atas (SKKA), Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).
- 5) **DI/DII:** Mereka yang tamat Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak (SGTK), Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Analisis

Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA), Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.

- 6) **Sarjana Muda/DIII:** Mereka yang tamat Akademi/Diploma III/Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas. Bagi mereka yang telah menempuh pendidikan sampai semester 8/9 dan belum tamat di fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda dinyatakan sebagai tamatan SLTA & sederajat.
- 7) **DIV, S1 atau Lebih:** Mereka yang tamat program pendidikan DIV, Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Doktor (Strata-3). Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

g. Tahun Mulai Beroperasi/Berproduksi secara Komersial

Tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru. Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.

h. Tenaga Kerja

- 1) **Tenaga kerja tetap dibayar:** Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) **Tenaga kerja tetap tidak dibayar:** Tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dinayar yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja** yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha **tidak termasuk sebagai pekerja**.

- 3) **Tenaga kerja produksi:** Tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Missal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.
 - 4) **Tenaga kerja lainnya:** Tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dan lain-lain.
- i. **Balas Jasa Pekerja Dibayar (Dalam Rupiah):** Balas jasa pekerja dibayar dibedakan atas upah pekerja tetap dan tidak tetap.
- 1) **Upah/gaji:** Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
 - 2) **Upah lembur:** Upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
 - 3) **Hadiah:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
 - 4) **Bonus:** Pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.
 - 5) **Tunjangan:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan tau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.

- j. **Biaya Umum** : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan/usaha meliputi:
- 1) **Bahan Baku**: Komponen bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.
 - 2) **Bahan Penolong**: Bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.
 - 3) **Bahan Bakar**: Segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.
 - 4) **Pelumas**: Zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.
 - 5) **Pemakaian Listrik (Biaya Listrik)**: Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.
 - 6) **Pemakaian Air**: Biaya pemakaian air bersih: biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengoelola air minum ataupun pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.
 - 7) **Pemakaian Gas Kota**: Biaya gas kota: biaya seluruh pemakaian gas kota untuk keperluan perusahaan/usaha.
 - 8) **Alat tulis dan keperluan kantor**: Semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.
 - 9) **Bunga atas pinjaman**: Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, missal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap

pinjaman pada tahun 2015 tetapi termasuk Bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.

- 10) Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi:** Seluruh biaya pengangkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.
- 11) Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal:** Pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.
- 12) Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/konstruksi, dan barang modal lainnya:** Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa. Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal. Pengisian besarnya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.
- 13) Sewa tanah untuk usaha:** Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu (bulan terakhir berproduksi sebelum pencacahan) atas penggunaan tanah milik pihak lain.
- 14) Pajak tak langsung:** Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

15) Jasa lainnya

Pembayaran jasa lainnya: Seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

Biaya jasa akuntan/konsultan: Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

Biaya untuk asuransi kerugian: Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan: seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan: Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri: pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

k. Pendapatan

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (makloon), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

- 1) **Pendapatan Utama:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
- 2) **Pendapatan dari kegiatan lain:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
- 3) **Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha, seperti: bunga atas simpanan di pihak lain atau

meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalty/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

I. Harta yang dimiliki

- 1) **Harta:** Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.
- 2) **Harta lancar:** Meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.
- 3) **Harta tetap:** Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, meliputi:
 - a) Tanah
 - b) Bangunan/gedung
 - c) Mesin dan perlengkapan seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya
 - d) Kendaraan
 - e) Harta tetap lainnya (hak cipta, hak paten)

m. Sumber modal: Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap. Sumber modal dapat berasal dari:

- 1) **Milik sendiri:** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/usaha/pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan dalam modal sendiri.
- 2) **Pihak lain:** Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam IMK13 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.

- a) **Bank:** Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
- b) **Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- c) **Lembaga Keuangan Bukan Bank:** Lembaga keuangan selain Bank dan Koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
- d) **Modal Ventura:** Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
- e) **Keluarga/Famili:** Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/family, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.
- f) **Lainnya:** Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

n. Kendala dan Pemasaran

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada tahun 2015, keanggotan koperasi, kemitraan usaha, bimbingan usaha, dan wilayah pemasaran.

- 1) **Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan:** Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti tenaga kerja selama tenaga kerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun

pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

- 2) **Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan Manajerial:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha secara umum.
- 3) **Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan Keterampilan/Teknik Produksi:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.
- 4) **Bimbingan/Penyuluhan Pemasaran:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.
- 5) **Kemitraan:** Hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada publikasi Gambaran Industri Mikro dan Kecil Provinsi Maluku Utara 2015 ini, menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) rev. 4 Tahun 2009, dengan rincian sebagai berikut:

a. Industri Makanan	KBLI : 10
b. Industri Minuman	KBLI : 11
c. Industri Tekstil	KBLI : 13
d. Industri Pakaian Jadi	KBLI : 14
e. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya	KBLI : 16
f. Industri Farmasi, Produksi Obat Kimia dan Obat Tradisional	KBLI : 21
g. Industri Barang Galian Bukan Logam	KBLI : 23
h. Industri Logam Dasar	KBLI : 24

i. Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya	KBLI : 25
j. Industri Alat Angkut Lainnya	KBLI : 30
k. Industri Furnitur	KBLI : 31
l. Industri Pengolahan Lainnya	KBLI : 32
m. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	KBLI : 33

<http://malut.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

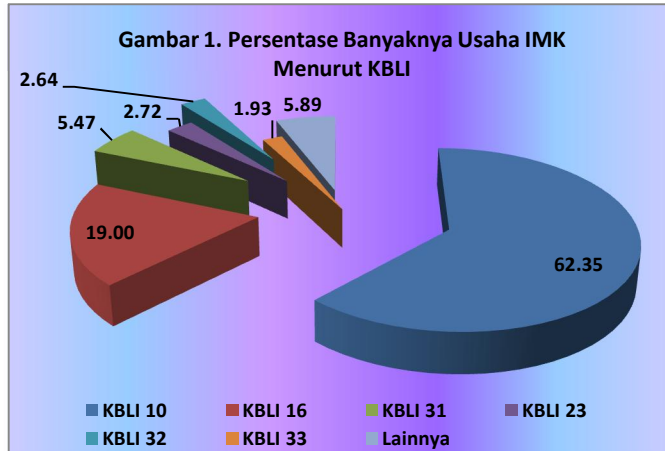
Industri Pengolahan Mikro dan Kecil

Pembangunan bidang industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kontribusi secara kongkret upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK). Sektor industri merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Sektor ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, IMK memiliki posisi penting dalam hal pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mengurangi kesenjangan (*gap*) pendapatan. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan dan pengelolaan dapat segera diatasi.

A. Banyaknya Perusahaan/Usaha

Hasil survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2015 (VIMK15) di Provinsi Maluku Utara, perusahaan/usaha IMK sebanyak 7.051 usaha (Tabel 1) yang terbagi dalam 13 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

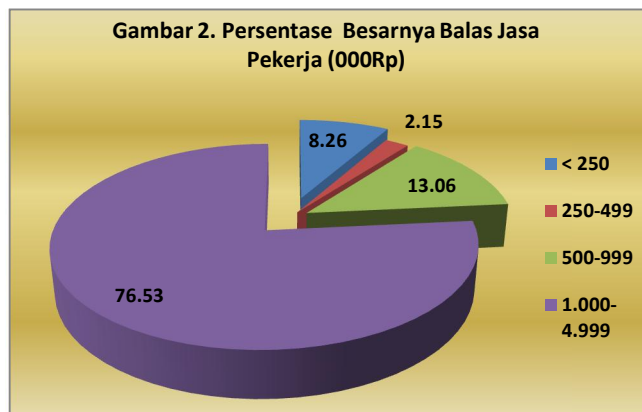


Indonesia (KBLI) Tahun 2009 rev. 4 (empat). Banyaknya perusahaan/usaha diurutkan dari yang terbanyak, yaitu Industri Makanan (KBLI 10) sebanyak 4.396 usaha (62,35 persen), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya (KBLI 16) sebanyak 1.340 usaha (19,00 persen), dan Industri Furnitur (KBLI 31) sebanyak 386 usaha (5,47 persen). Perusahaan/usaha IMK terkecil, yaitu Industri Tekstil (KBLI 13) sebanyak 23 usaha (0,30 persen), Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya (KBLI 25) sebanyak 29 usaha (0,41 persen), dan Industri Pakaian Jadi (KBLI 14) sebanyak 52 usaha (0,74 persen).

B. Tenaga Kerja dan Balas Jasa Pekerja

Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha IMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 terserap sebanyak 11.659 orang, yang terdiri dari 1.908 orang (16,37 persen) pekerja dibayar dan sebanyak 9.751 orang (83,63 persen) pekerja tidak dibayar. Dari pekerja dibayar, sebesar 79,98 persen (1.526 orang) merupakan pekerja

laki-laki dan 20,02 persen (382 orang) pekerja perempuan. Sedangkan dari pekerja tidak dibayar, sebesar 26,90 persen (2.623 orang) adalah pekerja laki-laki dan sebesar 73,10 persen (7.128 orang) pekerja perempuan.



Pekerja tidak dibayar di perusahaan/ usaha IMK yang sebesar 83,63 persen tersebut di atas, mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan/usaha IMK di Provinsi Maluku Utara tahun 2015 merupakan

usaha yang bersifat kekeluargaan dan memiliki administrasi usaha yang belum baik. Sedangkan perusahaan/usaha IMK yang melibatkan 16,37 persen pekerja dibayar, rata-rata balas jasa yang diterima per pekerja per bulan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 untuk 1 (satu) juta rupiah atau lebih sebesar 76,53 persen, sedangkan balas jasa per pekerja per bulan dibawah satu juta rupiah sebesar 33,47 persen. Total balas jasa pekerja yang dibayarkan selama tahun 2015 di Provinsi Maluku Utara oleh seluruh perusahaan/usaha IMK yang menggunakan pekerja dibayar sebesar 29,77 milyar rupiah.

C. Pengeluaran dan Pendapatan

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha IMK tidak terlepas dari biaya pengeluaran yang meliputi bahan baku bahan penolong, pengeluaran untuk bahan bakar dan pelumas, listrik, gas dan air, alat tulis dan keperluan kantor, angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi, sewa gedung, sewa mesin, sewa alat-

alat, biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, serta lainnya (kecuali pengeluaran untuk balas jasa pekerja). Di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 dengan perusahaan/usaha IMK sebanyak 7.051 usaha, total pengeluarannya sebesar 174,36 milyar rupiah.

Sedangkan dari 7.051 usaha IMK pada tahun 2015 di Provinsi Maluku Utara, sebesar 4,07 persen usaha dengan pendapatan setahun kurang dari lima juta rupiah, sebesar 4,42 persen usaha dengan pendapatan setahun antara lima juta sampai sembilan juta rupiah, sebesar 24,38 persen usaha dengan pendapatan setahun antara sepuluh juta sampai dua puluh empat juta rupiah, sebesar 34,12 persen usaha dengan pendapatan setahun antara dua puluh lima juta sampai empat puluh sembilan juta rupiah, sebesar 22,86 persen usaha dengan pendapatan setahun antara lima puluh juta sampai sembilan puluh sembilan juta rupiah, sebesar 6,98 persen usaha dengan pendapatan setahun antar seratus juta sampai seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah, 1,30 persen usaha dengan pendapatan setahun antar dua ratus juta sampai dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah, sebesar 0,72 persen usaha dengan pendapatan setahun antara tiga ratus juta sampai empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah, dan sebesar 0,38 persen usaha dengan pendapatan setahun antara lima ratus juta sampai sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah, serta sebesar 0,75 persen usaha dengan pendapatan setahun lebih dari satu milyar rupiah. Total pendapatan 7.051 perusahaan/usaha IMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 sebesar 436,57 milyar rupiah.

D. Kendala dan Pemasaran

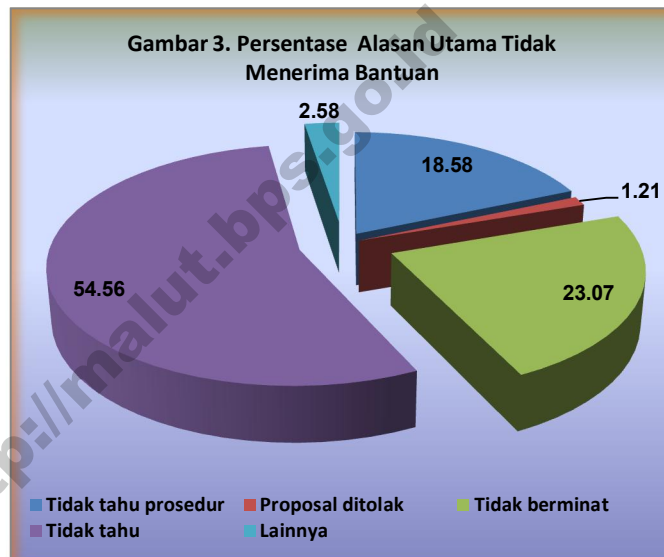
Sebagian besar atau sekitar 77,41 persen usaha IMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Tiga

jenis kesulitan utama, yaitu kesulitan dalam permodalan 40,55 persen, kesulitan pemasaran 29,33 persen, dan kesulitan bahan baku 8,28 persen.

Di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015, manfaat Koperasi pada usaha IMK ternyata belum dirasakan oleh sebagian besar pengusaha IMK. Terlihat dari hasil survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2015, hanya 6,01 persen saja pengusaha yang menjadi anggota Koperasi. Di samping itu, sebagian besar pengusaha IMK yaitu sekitar 91,85 persen tidak menerima pelayanan Koperasi, sedangkan sisanya, dari pengusaha yang menerima pelayanan Koperasi sebesar 8,15 persen, lebih dari setengah bagiannya (84,17 persen) memanfaatkan pinjaman uang.

Mayoritas alasan utama usaha IMK tidak menerima bantuan dari koperasi maupun non koperasi dalam pengembangan usahanya adalah dikarenakan tidak tahu ada bantuan sebesar 54,56 persen, disusul tidak tahu prosedur mencapai 18,58 persen, dan lainnya sebesar 2,58 serta proposal ditolak sekitar 1,21 persen. Yang

menarik untuk diamati dari usaha IMK, adanya pengusaha tidak berminat terhadap bantuan pengembangan usaha yang disediakan lembaga koperasi maupun non koperasi, yaitu sebanyak 23,07 persen.

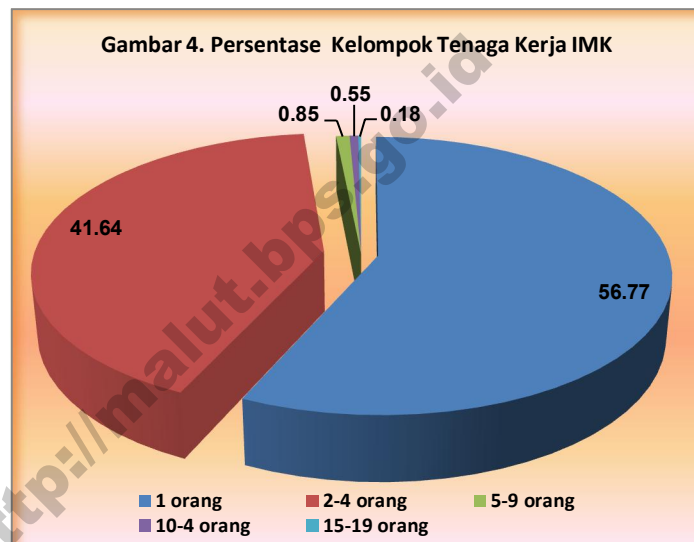


Lebih dari separuh atau sekitar 56,87 persen usaha IMK di Provinsi Maluku Utara mengalami kesulitan, sedangkan yang tidak mengalami kesulitan hanya sebesar 43,13 persen. Adapun kesulitan utama yang dialami yaitu, kesulitan utama selain bahan baku sebesar 70,67 persen dan kesulitan utama bahan baku sekitar 29,33. Jenis kesulitan utama bahan baku yang sebesar 20,89 persen tersebut, terdiri dari bahan baku jauh sebesar 54,51 persen, bahan baku mahal sebesar 24,15 persen, dan bahan baku langka sebesar 21,34 persen.

Tercatat dari hasil Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2015 di Provinsi Maluku Utara, sekitar 92,92 persen usaha tidak menjalin kemitraan dan hanya sebesar 7,08 persen yang menjalin kemitraan.

Gambaran Industri Mikro dan Kecil

Mayoritas dari 7.051 usaha IMK pada tahun 2015 di Provinsi Maluku Utara adalah Industri Mikro, yakni usaha yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang, yaitu sebanyak 6.939 usaha (98,41



persen). Dengan rincian sebanyak 4.003 usaha (56,77 persen) merupakan usaha dengan jumlah tenaga kerja hanya 1 (satu) orang, sebanyak 2.936 usaha (41,64 persen)

dengan jumlah tenaga kerja antara 2-4 orang, sebanyak 2.936 usaha (41,64 persen) dengan jumlah tenaga kerja antara 2-4 orang, sebanyak 60 usaha (0,85 persen) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sebanyak 39 usaha (0,39 persen) dengan jumlah tenaga kerja antara 10-14 orang, dan sisanya sebanyak 13 usaha (0,18 persen) dengan jumlah tenaga kerja antara 15-19 orang.

Sedangkan sumber modal usaha IMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 umumnya merupakan milik sendiri yaitu sebesar 91,26 persen, sebesar 8,00 persen usaha dengan modal sebagian dari pihak lain, dan sisanya sebesar 0,74 persen usaha adalah modal yang sepenuhnya dari pihak lain.

Rata-rata hari kerja dalam sebulan pada usaha IMK tahun 2015 di Provinsi Maluku Utara, yaitu antara 1-10 hari kerja sebesar 40,02 persen dengan rata-rata jam kerja per hari sekitar 6 (enam) jam. Sementara itu, usaha yang mempunyai rata-rata hari kerja dalam sebulan antara 11-20 hari dengan rata-rata jam kerja perhari sekitar 6 (enam) jam sebesar 26,32 persen, dan selebihnya 21 hari kerja atau lebih sebesar 33,65 persen dengan rata-rata jam kerja per hari sekitar 6 (enam) jam.

Tabel - Tabel

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 1. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil
(1)	(2)
10	4 396
11	61
13	21
14	52
16	1 340
21	64
23	192
24	93
25	29
30	95
31	386
32	186
33	136
Jumlah	7 051

Sumber : BPS (diolah)

Keterangan : *) Uraian kode dapat dilihat pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Tabel 2. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Kelompok Tenaga Kerja	
		1	2 – 4
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	8 524	10 788
82 Maluku Utara	7 051	4 003	2 936
91 Papua Barat	1 523	669	773
94 Papua	7 457	1 623	5 350

Lanjutan Tabel 2.

Provinsi	Kelompok Tenaga Kerja		
	5 – 9	10 – 14	15 – 19
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	174	89	-
82 Maluku Utara	60	39	13
91 Papua Barat	81	-	-
94 Papua	475	9	-

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 3. Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tenaga Kerja (Orang)		
		Dibayar	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	19 575	4 335	30 041	34 376
82 Maluku Utara	7 051	1 908	9 751	11 659
91 Papua Barat	1 523	1 270	1 995	3 215
94 Papua	7 457	5 912	13 246	19 158

Lanjutan Tabel 3.

Provinsi	Banyaknya Usaha	Pendapatan (Juta Rp)	Pengeluaran (Juta Rp)	Balas Jasa Pekerja (Juta Rp)
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
81 Maluku	19 575	1 199 999	440 555	82 8 41
82 Maluku Utara	7 051	436 571	174 360	29 769
91 Papua Barat	1 523	257 319	115 954	37 102
94 Papua	7 457	1 432 720	741 506	135 187

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 4. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari di Wilayah Maluku-Papua menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2015

Provinsi	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan			
	1 – 10		11 – 20	
	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	2 506	7	7 927	6
82 Maluku Utara	1 856	6	2 822	6
91 Papua Barat	260	5	488	5
94 Papua	2 265	5	2 074	6

Lanjutan Tabel 4.

Provinsi	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan		Jumlah	
	21 – 31		Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari
	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari		
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	9 142	6	19 575	6
82 Maluku Utara	2 373	6	7 051	6
91 Papua Barat	775	7	1 523	6
94 Papua	3 118	7	7 457	7

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 5. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2015

Provinsi	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha			
	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	1 401	7 451	4 241	5 352
82 Maluku Utara	660	2 498	1 956	1 830
91 Papua Barat	231	341	342	553
94 Papua	1 139	1 928	1 908	2 236

Lanjutan Tabel 5.

Provinsi	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha			Jumlah
	Diploma I/II	Sarjana Muda/ Diploma III	Sarjana (S1) dan Lebih Tinggi	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	44	256	830	19 575
82 Maluku Utara	-	13	94	7 051
91 Papua Barat	10	4	42	1 523
94 Papua	11	42	132	7 457

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 6. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Kelompok Umur Pengusaha	
		< 20	20 – 24
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	27	107
82 Maluku Utara	7 051	13	26
91 Papua Barat	1 523	-	24
94 Papua	7 457	7	59

Lanjutan Tabel 6.

Provinsi	Kelompok Umur Pengusaha		
	25 – 44	45 – 64	65 +
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	7 678	9 893	1 870
82 Maluku Utara	3 758	2 905	349
91 Papua Barat	757	678	64
94 Papua	3 582	3 446	363

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 7. Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2015

Provinsi	Laki-laki		
	Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	18 854	272	19 126
82 Maluku Utara	4 149	-	4 149
91 Papua Barat	2 082	28	2 110
94 Papua	10 966	432	11 398

Lanjutan Tabel 7.

Provinsi	Perempuan		
	Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Jumlah
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	15 144	106	15 250
82 Maluku Utara	7 451	59	7 510
91 Papua Barat	1 101	4	1 105
94 Papua	7 675	85	7 760

Lanjutan Tabel 7.

Provinsi	Jumlah		
	Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	33 998	378	34 376
82 Maluku Utara	11 600	59	11 659
91 Papua Barat	3 183	32	3 215
94 Papua	18 641	517	19 158

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 8. Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Provinsi	Pekerja Dibayar		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	3 697	638	4 335
82 Maluku Utara	1 526	382	1 908
91 Papua Barat	1 125	95	1 220
94 Papua	5 131	781	5 912

Lanjutan Tabel 8.

Provinsi	Pekerja Tidak Dibayar		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	15 429	14 612	30 041
82 Maluku Utara	2 623	7 128	9 751
91 Papua Barat	985	1 010	1 995
94 Papua	6 267	6 979	13 246

Lanjutan Tabel 8.

Provinsi	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	19 126	15 250	34 376
82 Maluku Utara	4 149	7 510	11 659
91 Papua Barat	2 110	1 105	3 215
94 Papua	11 398	7 760	19 158

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 9. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Bulan dalam Kelompok Ribuan Rupiah	
			< 100	100-249
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	19 575	1 620	63	119
82 Maluku Utara	7 051	605	11	39
91 Papua Barat	1 523	444	-	4
94 Papua	7 457	2 130	-	-

Lanjutan Tabel 9.

Provinsi	Banyaknya Usaha	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Bulan dalam Kelompok Ribuan Rupiah	
			250-499	500-999
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
81 Maluku	19 575	1 620	310	283
82 Maluku Utara	7 051	605	13	79
91 Papua Barat	1 523	444	4	32
94 Papua	7 457	2 130	39	159

Lanjutan Tabel 9.

Provinsi	Banyaknya Usaha	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Bulan dalam Kelompok Ribuan Rupiah	
			1000 - 4999	≥ 5000
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)
81 Maluku	19 575	1 620	749	96
82 Maluku Utara	7 051	605	463	-
91 Papua Barat	1 523	444	372	32
94 Papua	7 457	2 130	1 923	9

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 10. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Besaran Pendapatan Setahun Tahun 2015

Provinsi	Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah)			
	< 5	5-9	10-24	25-49
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	623	2 199	7 414	4 501
82 Maluku Utara	287	312	1 719	2 406
91 Papua Barat	34	73	245	282
94 Papua	-	298	1 559	1 319

Lanjutan Tabel 10.

Provinsi	Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah)			
	50 - 99	100 - 199	200 - 299	300 - 499
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	2 070	1 151	795	603
82 Maluku Utara	1 612	492	92	51
91 Papua Barat	291	219	113	111
94 Papua	1 753	1 283	356	378

Lanjutan Tabel 10.

Provinsi	Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah)		Jumlah
	500 - 999	≥ 1000	
(1)	(10)	(11)	(12)
81 Maluku	140	79	19 575
82 Maluku Utara	27	53	7 051
91 Papua Barat	119	36	1 523
94 Papua	265	246	7 457

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 11. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Sumber Modal Tahun 2015

Provinsi	Sumber Modal			Jumlah
	Sepenuhnya Milik Sendiri	Sebagian dari Pihak Lain	Sepenuhnya dari Pihak Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	18 894	377	304	19 575
82 Maluku Utara	6 435	564	52	7 051
91 Papua Barat	1 283	141	99	1 523
94 Papua	6 082	1 231	144	7 457

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 12. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Sumber Modal Utama Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Sumber Modal	
		Sepenuhnya Milik Sendiri	Pihak Lain
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	18 894	681
82 Maluku Utara	7 051	6 435	616
91 Papua Barat	1 523	1 283	240
94 Papua	7 457	6 082	1 375

Lanjutan Tabel 12.

Provinsi	Sumber Modal Utama		
	Bank	Koperasi	Lembaga Keuangan Bukan Bank
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	347	153	42
82 Maluku Utara	98	403	-
91 Papua Barat	162	24	-
94 Papua	431	-	26

Lanjutan Tabel 12.

Provinsi	Sumber Modal Utama		
	Perorangan	Keluarga	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	94	9	36
82 Maluku Utara	1	114	-
91 Papua Barat	36	14	4
94 Papua	13	225	680

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 13. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha yang Memanfaatkan Pinjaman	Meminjam dari Bank	Tidak Meminjam dari Bank
81 Maluku	681	347	334
82 Maluku Utara	616	98	518
91 Papua Barat	240	162	78
94 Papua	1 375	431	944

Lanjutan Tabel 13.

Provinsi	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank		
	Tiak Tahu Prosedur	Prosedur Sulit	Tidak Ada Agunan
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	45	176	9
82 Maluku Utara	142	42	39
91 Papua Barat	8	12	4
94 Papua	156	27	297

Lanjutan Tabel 13.

Provinsi	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank		
	Suku Bunga Tinggi	Usulan Ditolak	Tidak Berminat
(1)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	9	-	95
82 Maluku Utara	14	-	281
91 Papua Barat	5	-	49
94 Papua	-	-	464

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 14. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Meminjam dari Bank menurut Besarnya Pinjaman Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha yang Memanfaatkan Pinjaman	Meminjam dari Bank	Tidak Meminjam dari Bank
81 Maluku	681	347	334
82 Maluku Utara	616	98	518
91 Papua Barat	240	162	78
94 Papua	1 375	431	944

Lanjutan Tabel 14.

Provinsi	Besarnya Pinjaman Bank		
	< Rp. 20 Juta	Rp. 20-500 Juta	> Rp. 500 Juta
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	208	139	-
82 Maluku Utara	25	73	-
91 Papua Barat	22	136	4
94 Papua	93	286	52

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 15. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kredit Bersubsidi Tahun 2015

Provinsi	Meminjam dari Bank	Pinjaman Kredit Bersubsidi	Bukan Pinjaman Kredit Bersubsidi
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	347	113	234
82 Maluku Utara	98	50	48
91 Papua Barat	162	62	100
94 Papua	431	91	340

Lanjutan Tabel 15.

Provinsi	Jenis Kredit Bersubsidi			
	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE)	Pinjaman Bergulir PNPB	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
81 Maluku	79	-	-	34
82 Maluku Utara	50	-	-	-
91 Papua Barat	62	-	-	-
94 Papua	44	27	-	20

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 16. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Mengalami Kesulitan	Mengalami Kesulitan
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	5 848	13 727
82 Maluku Utara	7 051	3 041	4 010
91 Papua Barat	1 523	362	1 161
94 Papua	7 457	1 754	5 703

Lanjutan Tabel 16.

Provinsi	Jenis Kesulitan Utama			
	Bahan Baku	Pemasaran	Modal	BBM/ Energi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
81 Maluku	2 057	3 653	6 879	36
82 Maluku Utara	1 176	803	1 626	156
91 Papua Barat	292	332	419	17
94 Papua	680	1 085	2 623	33

Lanjutan Tabel 16.

Provinsi	Jenis Kesulitan			
	Transportasi	Keterampilan	Upah Buruh	Lainnya
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)
81 Maluku	203	301	17	581
82 Maluku Utara	78	28	-	143
91 Papua Barat	4	4	6	87
94 Papua	219	28	272	763

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 17. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Mengalami Kesulitan	Mengalami Kesulitan	
			Selain Bahan Baku	Bahan Baku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	19 575	5 848	11 670	2 057
82 Maluku Utara	7 051	3 041	2 834	1 176
91 Papua Barat	1 523	362	869	292
94 Papua	7 457	1 754	5 023	680

Lanjutan Tabel 17.

Provinsi	Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku			
	Langka	Mahal	Jauh	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	1 407	309	227	114
82 Maluku Utara	251	284	641	-
91 Papua Barat	76	125	86	5
94 Papua	167	125	357	31

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 18. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Menjalinkan Kemitraan	Menjalinkan Kemitraan
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	19 126	449
82 Maluku Utara	7 051	6 552	499
91 Papua Barat	1 523	1 350	173
94 Papua	7 457	6 265	1 192

Lanjutan Tabel 18.

Provinsi	Jenis Kemitraan yang Diterima		
	Pinjaman Uang	Pengadaan Bahan Baku	Pemasaran
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	142	56	165
82 Maluku Utara	40	143	381
91 Papua Barat	24	66	99
94 Papua	118	902	609

Lanjutan Tabel 18.

Provinsi	Jenis Kemitraan yang Diterima		
	Mesin	Barang Modal	Lainnya
(1)	(9)	(10)	(11)
81 Maluku	62	9	24
82 Maluku Utara	-	-	13
91 Papua Barat	5	10	7
94 Papua	-	643	13

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 19. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Menjalin Kemitraan	Menjalin Kemitraan
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	19 126	449
82 Maluku Utara	7 051	6 552	499
91 Papua Barat	1 523	1 350	173
94 Papua	7 457	6 265	1 192

Lanjutan Tabel 19.

Provinsi	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan		
	BUMN/BUMD	Swasta	Perbankan
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	-	80	43
82 Maluku Utara	13	13	-
91 Papua Barat	4	44	4
94 Papua	22	13	105

Lanjutan Tabel 19.

Provinsi	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan	
	LSM	Lainnya
(1)	(8)	(9)
81 Maluku	62	264
82 Maluku Utara	-	473
91 Papua Barat	-	175
94 Papua	18	1 034

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 20. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang menjadi Anggota Koperasi menurut Jenis Pelayanan yang Diterima Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Bukan Anggota Koperasi	Anggota Koperasi	Tidak Menerima Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	19 575	19 278	297	19 291
82 Maluku Utara	7 051	6 627	424	6 476
91 Papua Barat	1 523	1 472	51	1 423
94 Papua	7 457	7 318	139	6 394

Lanjutan Tabel 20.

Provinsi	Menerima Pelayanan	Jenis Pelayanan yang diterima Setahun yang Lalu		
		Uang	Bahan Baku	Pemasaran
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	284	123	18	-
82 Maluku Utara	575	484	-	26
91 Papua Barat	100	60	17	27
94 Papua	1 063	264	619	563

Lanjutan Tabel 20.

Provinsi	Menerima Pelayanan	Jenis Pelayanan yang diterima Setahun yang Lalu		
		Mesin	Barang Modal	Lainnya
(1)	(6)	(10)	(11)	(12)
81 Maluku	284	-	125	27
82 Maluku Utara	575	13	26	39
91 Papua Barat	100	-	23	-
94 Papua	1 063	27	751	-

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 21. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Menerima Pelayanan/Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Pernah Menerima Pelayanan/Bantuan	Pernah Menerima Pelayanan/Bantuan
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	19 291	284
82 Maluku Utara	7 051	6 476	575
91 Papua Barat	1 523	1 423	100
94 Papua	7 457	6 394	1 063

Lanjutan Tabel 21.

Provinsi	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan		
	Pemerintah	Koperasi	Swasta
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	125	45	9
82 Maluku Utara	52	416	-
91 Papua Barat	31	46	-
94 Papua	166	51	-

Lanjutan Tabel 21.

Provinsi	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan		
	Perbankan	LSM	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	27	-	78
82 Maluku Utara	47	-	60
91 Papua Barat	24	5	4
94 Papua	106	60	740

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 22. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan	
		Tidak Tahu Prosedur	Proposal Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	1 605	115
82 Maluku Utara	7 051	1 201	78
91 Papua Barat	1 523	68	21
94 Papua	7 457	2 191	165

Lanjutan Tabel 22.

Provinsi	Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan		
	Tidak Berminat	Tidak Tahu	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	4 944	12 459	168
82 Maluku Utara	1 491	3 526	167
91 Papua Barat	140	1 079	105
94 Papua	1 012	2 480	546

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 23. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Mengikuti Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan (BPP) menurut Penyelenggara BPP yang Diterima Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Mengikuti BPP	Mengikuti BPP
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	19 230	345
82 Maluku Utara	7 051	6 820	231
91 Papua Barat	1 523	1 432	91
94 Papua	7 457	7 163	294

Lanjutan Tabel 23.

Provinsi	Penyelenggara BPP		
	Sendiri	Pemerintah	Swasta
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	-	292	17
82 Maluku Utara	26	114	13
91 Papua Barat	26	57	4
94 Papua	81	221	26

Lanjutan Tabel 23.

Provinsi	Penyelenggara BPP	
	LSM	Lainnya
(1)	(8)	(9)
81 Maluku	18	27
82 Maluku Utara	26	52
91 Papua Barat	9	-
94 Papua	25	31

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 24. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Distribusi Pemasaran dan Banyaknya Hasil Produksi untuk Perusahaan Tahun 2015

Provinsi	Banyaknya Usaha	Wilayah Pemasaran	
		Perusahaan	Pedagang
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	19 575	578	3 621
82 Maluku Utara	7 051	236	2 958
91 Papua Barat	1 523	119	280
94 Papua	7 457	216	3 201

Lanjutan Tabel 24.

Provinsi	Banyaknya Usaha	Wilayah Pemasaran	
		Rumah Tangga	Lainnya
(1)	(2)	(5)	(6)
81 Maluku	19 575	15 331	45
82 Maluku Utara	7 051	3 831	26
91 Papua Barat	1 523	1 074	50
94 Papua	7 457	3 768	272

Lanjutan Tabel 24.

Provinsi	Banyaknya Hasil Produksi untuk Perusahaan			
	1% - 25%	25% - 49%	50% - 79%	80% - 100%
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	18 946	51	24	554
82 Maluku Utara	6 781	47	85	138
91 Papua Barat	1 404	-	29	90
94 Papua	7 206	35	79	137

Sumber : BPS (diolah)

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 25. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alokasi Utama Pemasaran Hasil Produksi Tahun 2015

Provinsi	Lokasi Pemasaran				
	Banyaknya Usaha	Dalam Satu Kabupaten/Kota	Luar Kabupaten/Kota Satu Provinsi	Luar Provinsi	Luar Negeri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81 Maluku	19 575	18 535	1 029	-	11
82 Maluku Utara	7 051	6 987	55	9	-
91 Papua Barat	1 523	1 440	73	10	-
94 Papua	7 457	7 370	65	22	-

Sumber : BPS (diolah)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://malut.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Jl. Stadion No 65 Telp (0921) 3126301 – Ternate 97712
Homepage : <http://malut.bps.go.id> Email : BPS8200@bps.go.id